



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BKKBN, BADAN POM, ASKES, JAMSOSTEK, BNP2TKI DAN DJSN)**

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: III
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Komite Aksi Jaminan Sosial untuk Rakyat dan Pekerja/Buruh
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 5 April 2010
Waktu	: Pukul 12.00 WIB - selesai
Ketua Rapat	: Ir. Abdul Aziz Suseno, MT /Ketua Pokja Tenaga Kerja dan Transmigrasi Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara	: Menerima Audiensi
Jumlah kehadiran	: 5 Anggota Komisi IX DPR RI

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Komite Aksi Jaminan Sosial untuk Rakyat dan Pekerja/Buruh dibuka pukul 13.30 WIB.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Komite Aksi Jaminan Sosial untuk Rakyat dan Pekerja/Buruh menyampaikan aspirasi sebagai berikut :
 - a. Jaminan Kesehatan harus seumur hidup dan diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia (termasuk Pekerja/Buruh yang sudah tidak lagi bekerja);
 - b. Jaminan Pensiun seumur hidup bagi Pekerja/Buruh formal (tidak hanya untuk PNS/TNI/Polri saja);
 - c. Badan Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/ BPJS (termasuk BPJS Jamsostek) harus berbadan hukum Wali Amanat;

- e. BPJS (termasuk BPJS Jamsostek) harus menganut prinsip-prinsip : gotong royong, nirlaba, akuntabilitas, kepesertaan wajib, kehati-hatian, keterbukaan, portabilitas, dana amanat, dan seluruh hasil pengelolaan dana Jamsos harus untuk peserta;
 - f. BPJS tidak wajib menyetor dividen dan pajak kepada pemerintah.
2. Komisi IX DPR RI menerima dan menyetujui aspirasi yang disampaikan oleh Komite Aksi Jaminan Sosial untuk Rakyat dan pekerja/buruh untuk merevisi UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi prioritas untuk dibahas tahun 2010.
 3. Perlu adanya masukan dan pengawasan dari masyarakat kepada DPR RI agar RUU tentang BPJS dapat segera dibahas oleh Komisi IX DPR RI dan disahkan pada tahun 2010.
 4. Komisi IX DPR RI saat ini sedang merumuskan draft RUU dan Naskah Akademis RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
 5. Setelah perumusan draf dan naskah akademis RUU BPJS selesai, selanjutnya akan diserahkan ke Badan Legislasi DPR RI untuk dilakukan harmonisasi. Setelah harmonisasi, disampaikan kepada Ketua DPR RI untuk diagendakan dalam Rapat Paripurna menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI.
 6. Agar sistem jaminan sosial harus dikelola oleh Badan Wali Amanat maka dalam RUU tentang BPJS perlu ditetapkan satu pasal mengenai Wali Amanat sehingga tidak perlu merevisi UU tentang BUMN.

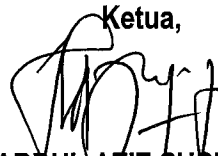
III. CATATAN PENTING

1. Komisi IX DPR RI menerima dan menyetujui aspirasi yang disampaikan oleh Komite Aksi Jaminan Sosial untuk Rakyat dan pekerja/buruh untuk merevisi UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
2. Komisi IX DPR RI saat ini sedang merumuskan draft RUU dan Naskah Akademis RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). RUU tentang BPJS menjadi RUU Prioritas Komisi IX DPR RI tahun 2010.
3. Setelah perumusan draf dan naskah akademis RUU BPJS selesai, selanjutnya akan diserahkan ke Badan Legislasi DPR RI untuk dilakukan harmonisasi. Setelah harmonisasi, disampaikan kepada Ketua DPR RI untuk diagendakan dalam Rapat Paripurna menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI.

Rapat diakhiri pukul 15.10 WIB

Jakarta, 5 April 2010
Pimpinan POKJA NAKERTRANS
Komisi IX DPR RI

Ketua,



Ir. ABDUL AZIZ SUSENO, MT